

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem tata kelola yang tepat bagi suatu lembaga maupun institusi atau sering dikenal dengan istilah *Good Governance* mutlak diperlukan apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Melalui sistem tata kelola yang tepat akan mengindikasikan kinerja yang baik juga dari institusi maupun lembaga sehingga mampu memberikan *output* yang sesuai. Lembaga sektor publik tidak terkecuali, dalam hal ini setiap instansi milik pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan informasi serta laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan bagi para *stakeholder* yaitu masyarakat. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam menumbuhkan kepercayaan public terhadap kinerja keuangan pemerintah, sekarang ini sudah menjadi fenomena yang penting dalam pelaporan keuangan negara. Jika pemerintah konsisten dalam memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan yang terpercaya serta transparan, maka akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga menambah dukungan masyarakat pada pemerintah (Irwan, 2017).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap perwujudan akuntabilitas serta transparansi dapat menyebabkan implikasi bagi organisasi sektor public agar memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya ialah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Dina & Diana Elvianita, 2017). Laporan keuangan

adalah unsur primer dalam pelaporan keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan (Zaki, 2014). Laporan keuangan dalam sektor public adalah komponen yang vital dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik.

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku sekarang ini, desa memiliki kedudukan yang esensial untuk menyokong pemerintahan daerah dalam proses pengelolaan pemerintah termasuk dalam pembangunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa merupakan salah satu dari sistem pemerintahan, tidak lepas dari tuntutan akuntabilitas dan transparansi terkait bagaimana pelaporan keuangannya (Budi, 2018). Meskipun pelaporan keuangan desa dituntut agar mampu melaksanakan akuntabilitas, namun pada realitanya akuntabilitas pelaporan keuangan desa masih dalam golongan yang rendah. Rendahnya akuntabilitas ini akan menimbulkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Hadiat Trihutomo et al., 2020). Selain perwujudan dan akuntabilitas, diperlukan juga transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa *stakeholders* mempunyai kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan serta tindakan atas institusi pemerintah serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Iklim transparansi yang dihasilkan dengan proses komunikasi yang akurat serta efektif dengan pihak *stakeholders*

dapat menyokong proses manifestasi suatu kegiatan secara efektif dan efisien (Diana, 2012). Pelaporan keuangan pemerintah desa sebagaimana yang telah diatur dalam standar pelaporan keuangan pemerintah desa terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa.

Bercermin dari problematika yang ada maka pemerintah membuat satu aplikasi keuangan desa yang bertujuan untuk memudahkan aparat desa dalam menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel serta transparan. Aplikasi tersebut ialah aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa. Aplikasi Siskeudes ditujukan bagi aparat pemerintah desa untuk memudahkan dalam menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembukuan (BPKP dan Kemendagri, 2018). Fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi Siskeudes pun dibuat sederhana dan *user friendly* agar memudahkan pengguna dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes (Oktaviani Rita & Dendi, 2018).

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini dipertegas melalui himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang memerintahkan bagi keseluruhan desa di Indonesia untuk memahami dengan baik aplikasi Siskeudes serta diharapkan desa segera menggunakan aplikasi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan desa. Melalui penggunaan teknologi informasi dalam suatu pelaporan keuangan desa diharapkan dapat membantu desa dalam mewujudkan pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan yang tepat waktu dan berdaya guna.

Walaupun aplikasi Siskeudes telah diperkenalkan kepada berbagai desa di Indonesia sejak tahun 2016 lalu namun belum seluruhnya telah menggunakan aplikasi Siskeudes dikarenakan keputusan pada masing-masing daerah belum seluruhnya sejalan. Per 31 Desember 2019, penggunaan aplikasi Siskeudes baru mencapai 95,06% dari keseluruhan desa di Indonesia. Penggunaan aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah dilakukan oleh 71.249 desa yang tersebar di 417 kabupaten/kota dari total keseluruhan desa yaitu 74.954 yang tersebar di 434 kabupaten/kota. Adapun infografis dari penggunaan aplikasi Siskeudes adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Infografis Penggunaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0



Sumber : Situs Resmi BPKP 2022

Di Desa tempat penelitian yaitu Jatimukti, aplikasi Siskeudes ini baru digunakan pada tahun 2018 setelah ada himbuan dari Kabupaten Sumedang yang mengharuskan seluruh desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Selama ini, desa

Jatimukti sudah melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Desa Jatimukti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, sudah menggunakan aplikasi Siskeudes ini dengan harapan agar dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebelumnya, pemerintahan desa Jatimukti membuat laporan keuangan secara manual yaitu memakai *Microsoft Excel* dengan komponen data yang disajikan sama seperti menggunakan aplikasi Siskeudes. Kemudian, dalam menggunakan aplikasi Siskeudes ini terdapat pengendalian internal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 29 PP RI No. 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengendalian aplikasi ini terdiri atas pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi serta pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Dalam pengoperasiannya, aplikasi Siskeudes ini membutuhkan koneksi internet serta perangkat komputer yang mendukung. Selain itu, setiap tahunnya terdapat pembaruan dalam aplikasi yang membuat operator mengalami kesulitan terutama dalam perubahan anggarannya. Meskipun diadakan pelatihan kembali, akan tetapi masih kurang efektif ketika operator mulai menguasai versi tersebut lalu di tahun berikutnya terdapat pembaruan lagi.

Melihat kondisi di desa tersebut sangat memungkinkan ketidakefektifan dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan jika penggunaannya tidak efektif bagaimana kemudian peran dari aplikasi tersebut serta bagaimana pemerintah desa dapat mengelola keuangannya dengan baik, sedangkan pemerintah desa sendiri dituntut untuk mampu menghasilkan informasi yang akuntabel serta transparan, maka peneliti hendak menganalisis peran aplikasi sistem keuangan desa, terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian ini mengkaji aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan dalam menghasilkan informasi berupa APBDes yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan ini harus memenuhi karakteristik cepat, efisien, aman dan publikasi.

Dari keterangan dan sajian data diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan judul **“Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan (Studi Kasus Pada Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang).”**

IKOPIN
University

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi sistem keuangan desa dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan pada aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana kendala dari perangkat pendukung aplikasi sistem keuangan desa dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang agar laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan transparan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi serta data mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab identifikasi masalah seperti yang dirumuskan diatas dan bertujuan untuk :

- a. Mengetahui gambaran aplikasi sistem keuangan desa dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- b. Mengetahui pengendalian internal yang diterapkan pada aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- c. Mengetahui kendala dari perangkat pendukung aplikasi sistem keuangan desa dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- d. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang agar laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan transparan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran dan manfaat berikut :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan juga pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang digunakan pemerintah desa dalam menghasilkan laporan keuangannya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa, kabupaten, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya serta diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis terkait dengan peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.